



BAPENDA

2025

LAPORAN LKjIP



BAPENDA KAB. SERANG



Bapenda
Kabupaten Serang



BAPENDA
KAB. SERANG



@bapenda_Serangkab



<https://bapenda.serangkab.go.id>



Layanan Pengaduan
081119135436

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapenda dan Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Serang.

Pada RPJMD Tahun 2021-2026 Bapenda Kabupaten Serang mempunyai satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dua Indikator Kinerja Program, yaitu :

1. Tingkat Ketercapaian Target PAD.
2. Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda pada Tahun 2025 adalah Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar 3,39%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian hingga Tahun 2025 mencapai 17,29%. IKU ini dihitung dengan membandingkan rasio realisasi kenaikan PAD pada tahun berjalan terhadap PAD pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan Indikator Kinerja Program, pertama, Tingkat Ketercapaian Target PAD Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi capaian sebesar 100,91%. Kedua, Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi mencapai 100%.

Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021–2026, penyusunan laporan kinerja tahun 2025 ini juga mengakomodasi arah kebijakan dan sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan

adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah, yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, sebagai pendukung pencapaian IKU dimaksud, ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Program, yaitu:

1. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah
2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
3. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
4. Nilai SAKIP
5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

IKU Bapenda pada tahun 2025 memiliki indikator Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah dengan target sebesar 31,57% dengan realisasi 31,32%. Adapun untuk indikator Program yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 31,57%, sedangkan realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 tercatat sebesar 31,32%. Indikator ini dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun berjalan, yang mencerminkan tingkat kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah.

Selanjutnya, indikator Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 100%, dengan realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 sebesar 100%. Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan terhadap seluruh objek dan pelaksana pemungutan pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 91% dengan hasil realisasi sebesar 98%. Indikator ini menggambarkan tingkat implementasi dan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Bapenda pada tahun 2025 menargetkan capaian sebesar 80,65, dengan realisasi sampai dengan laporan dibuat belum ada, menunggu hasil dari Tim Evaluator SAKIP Inspektorat Kabupaten Serang. Indikator ini mencerminkan kualitas

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Bapenda dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 90,62 dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 mencapai Nilai 89,44. Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei terhadap pengguna layanan Bapenda dan digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2025 dari 01 Januari sampai 31 Desember 2025 dengan cetak per tanggal 12 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Serang, dapat dilihat rincian target dan realisasi Pendapatan dan Belanja dibawah ini adalah :

A. Pendapatan Daerah

Target PAD tahun 2025 sebesar Rp.1.097.550.142.214,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp. 1.107.574.335.688,- atau 100,91%. Capaian tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. PAD dari sektor Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 dari target sebesar Rp.725.174.381.504,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp.736.179.846.949,- atau 101,52%.
2. PAD dari sektor Retribusi Daerah pada tahun 2025 dari target Rp.252.142.584.022,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp.270.387.639.630,- atau sebesar 107,24%.
3. PAD dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2025 dari target Rp.18.932.083.377,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp.18.905.083.376,- atau 99,86%.
4. PAD dari sektor Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2025 dari target Rp.101.301.093.311,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp.82.101.765.733,- atau 81,05%.

Tabel 1. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran	Realiasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.097.550.142.214	1.107.574.335.688	100,91
Pajak Daerah	725.174.381.504	736.179.846.949	101,52
Retribusi Daerah	252.142.584.022	270.387.639.630	107,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.932.083.377	18.905.083.376	99,86
Lain-lain PAD yang Sah	101.301.093.311	82.101.765.733	81,05

Sumber : LRA Pendapatan dan Belanja Daerah PEMDA (Konsolidasi) Tahun 2025 cetak per 12 Januari 2026

B. Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp.63.496.162.195,- dengan realisasi sebesar Rp.57.213.484.449,- atau 90,11%. Adapun rincian belanja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.056.099.573	50.291.201.125	89,72
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.837.500	47.333.858	98,95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.741.096.931,42	44.720.970.341	89,91
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.527.887.800	2.350.287.493	92,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.439.030.000	1.365.300.000	94,88
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.648.831.997,58	1.392.795.944	84,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.415.344	414.513.489	63,63
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.440.062.622	6.922.283.324	93,04
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.440.062.622	6.922.283.324	93,04
BELANJA OPERASI	13.756.582.763,58	12.494.028.680	90,82
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	49.739.579.431,42	44.719.455.769	89,91
TOTAL BELANJA DAERAH	63.496.162.195	57.213.484.449	90,11

Sumber : LRA Belanja Bapenda Tahun 2025 cetak per 12 Januari 2026

KATA PENGANTAR

Salah satu tuntutan reformasi yang diharapkan oleh masyarakat adalah terwujudnya reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, penerapan pelayanan satu atap, serta peningkatan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Seluruh langkah ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima serta membangun organisasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dikembangkan media pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bapenda Kabupaten Serang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk kewajiban Bapenda Kabupaten Serang dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja, baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi dua kebutuhan utama, yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan serta sebagai sarana evaluasi dan analisis capaian kinerja secara berkelanjutan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

LKjIP Bapenda Kabupaten Serang menyajikan capaian kinerja hingga Tahun 2025 beserta analisisnya. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam penyusunannya, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Selain itu, LKjIP ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran Bapenda Kabupaten Serang serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja, sekaligus menjadi sarana informasi bagi masyarakat mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Dengan demikian,

diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Serang secara keseluruhan.

Serang, 05 Januari 2026

Plt. KEPALA BAPENDA
KABUPATEN SERANG



H. ABER NURHADI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19661216 199003 1 005